



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 02 Mei 2019

Halaman: 18

Kesejahteraan Pekerja Yogyakarta Rendah

• SILVY DIAN SETIAWAN, WAHYU SURYANA

Buruh dituntut bisa menyesuaikan diri dengan perubahan

YOGYAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta menyebut tingkat kesejahteraan pekerja di Kota Yogyakarta masih rendah. Hal ini dikarenakan pengupahan pekerja yang masih di bawah upah minimum.

"Masih banyak yang di bawah upah minimum Kota Yogyakarta terutama dari sisi perusahaanya yang masih berat," kata Ketua DPC KSPSI Kota Yogyakarta, Tri Agus Hariyadi kepada *Republika*, Rabu (1/5).

Tri mengatakan, laporan pekerja yang mengeluhkan pengupahan yang rendah pun juga belum ada. Sebab, kebanyakan pekerja memiliki dua penghasilan. "Jadi pekerja tidak terlalu keberatan sama upah yang rendah karena ada penghasilan lain," ujarnya.

Sementara, Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans Kota Yogyakarta tidak mampu berbuat banyak. Termasuk memberi sanksi perusahaan yang memberikan upah di bawah standar Kota Yogyakarta.

"Kewenangan kami sifatnya hanya memberi pembinaan. Untuk penindakan nanti ada pengwas di tingkat provinsi," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial (KHI) Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto.

Walaupun begitu, pihaknya tetap melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait standar pengupahan ini. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memberikan upah sesuai standar. "Kita telah membentuk tim pembinaan ke perusahaan-perusahaan. Salah satu diantaranya pembinaan kesejahteraan karyawan agar perusahaan tidak salah kaprah," ujarnya.

Buruh wajib berinovasi

Sejien Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi mengatakan, buruh atau pekerja memang dituntut bisa menyesuaikan diri dengan peru-

bahan. Utamanya, perubahan yang didatangkan Revolusi Industri 4.0. Ia menekankan, buruh tidak boleh cuma berdiam diri, justru wajib melakukan inovasi.

Pemerintah dan akademisi diharapkan dapat pula memberi solusi terkait persoalan-persoalan yang lahir. Kirnadi berpendapat, otomatisasi dan mekanisasi merupakan suatu tantangan nyata yang dihadapi buruh. Sebal, 4.0 yang menghadirkan banyak pekerjaan baru, dan menghilangkan banyak pekerjaan.

"Ada banyak jenis pekerjaan yang hilang, misalnya saat ini di sektor perbankan dan perhotelan banyak melakukan pengurangan pegawai," kata Kirnadi.

Dosen Fakultas Hukum UGM, Ari Hernawan menuturkan, revolusi industri 4.0 memang akan sangat berdampak kepada sektor ketenagakerjaan. Banyak yang berubah di sektor itu, salah satunya perubahan pola hubungan kerja.

Polanya kini dan nanti tidak lagi mengikuti sistem dalam undang-undang. Dalam beberapa pekerjaan kontrak kerja, hanya didasarkan kepercayaan dan tidak ada kontrak tertulis. Ia turut menyoroti mahasiswa sebagai kaum intelektual, yang justru diharapkan dapat berpikir secara kritis. Dengan begitu, ia berharap, dapat lahir buruh-buruh yang berpikiran kritis pula.

"Dari rahim intelektual seharusnya mampu menginjeksi kesadaran internal, boleh memberi dukungan bagi buruh tapi terpenting kesadaran internal buruh untuk melakukan perubahan," ujar Ari.

Ari berharap, mahasiswa-mahasiswa dapat melahirkan buruh yang cerdas dan dapat mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Khususnya, dampak revolusi industri 4.0 dan mencari solusi menyelesaikan masalah-masalah itu.

Senada, Sinegi Aditya dari HMP UGM menambahkan, mahasiswa dapat membangun kesadaran kritisitas dan berpikir kepada buruh. Keberpihakan itu dimilai penting. Pasanya, mahasiswa merupakan calon buruh yang pemikiran dan keberpihakannya menjadi vital bagi masa depan. Bahkan, tinggal menanti waktu mahasiswa itu menjadi buruh. "Mahasiswa merupakan buruh yang tertunda, karenanya harus berpikir kepada buruh," kata Aditya. ■ ed: fernan zahadi

Pt: Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005